

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NO. 48/P/M.KOMINFO/11/2009 TENTANG  
PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (STUDI DI  
KAMPUNG ASA DAN KAMPUNG JUHAN ASA  
KECAMATAN BARONG TONGKOK  
KABUPATEN KUTAI BARAT)**

**Irwan Lejau<sup>1</sup>**

***Abstrak***

**IRWAN LEJAU. NIM 0902025050.** *Studi Tentang Implementasi Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 48/P/ M.KOMINFO/11/2009 tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Drs. H. Muhammad Noor, M.Si pembimbing I dan Budiman, S.Ip, M.Si selaku pembimbing II. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Implementasi Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 48/P/ M.KOMINFO/11/2009 tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan dalam Pembangunan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.*

*Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 48/P/ M.KOMINFO/11/2009 tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.*

*Kesimpulan penelitian ini adalah Pusat Layanan Internet kecamatan pelaksanaan belum maksimal karena masih rendahnya SDM masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat.*

***Kata Kunci:*** *Implementasi, Layanan Internet*

## **Pendahuluan**

Dalam UU Pasal 28 Tahun 1945, yang pangertiannya adalah setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [lejau.irwan99@gmail.com](mailto:lejau.irwan99@gmail.com)

peribadi dan lingkungan sosialnya , serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, pada bab1 nomor 7 disebutkan bahwa kampung adalah sebutan lain desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai barat.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (2012:81), desa informasi merupakan suatu kesatuan layanan yang terdiri dari Desa Pintar (Punya Internet) yang mampu mengakses dan menyiapkan informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap pembangunan masyarakat, melalui program desa informasi yang dikembangkan secara berkelanjutan, masyarakat akan memperoleh akses informasi yang cukup memadai untuk menambah pengetahuan dan wawasan.

Menteri kominfo (2012:82-83), Sudah menjadi suatu keyakinan bahwa manusia dapat meningkatkan taraf kehidupannya dengan cara memiliki dan menguasai informasi yang sesuai dengan kebutuhannya dalam arti informasi tersebut bersifat mendidik (*educating*), mencerah (*enlighting*), memberdayakan (*empowering*), dan dalam kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian mendapatkan informasi dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (NKRI).

Prianova (2010:2-3), mengungkapkan bahwa informasi dan komunikasi memberi banyak keuntungan dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Memperhatikan dampak positif kehadiran komunikasi di pedesaan, sudah selayaknya apabila seluruh desa di Indonesia memiliki akses komunikasi. Lebih dari sekadar memberikan keuntungan kepada masyarakat pedesaan, ketersediaan akses komunikasi di pedesaan juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Pertimbangannya, komunikasi yang efektif, bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Selain memberikan dampak positif bagi desa bersangkutan, kehadiran akses informasi dan komunikasi di pedesaan pada gilirannya juga akan mendukung komunikasi secara nasional. Peningkatan komunikasi secara umum akan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi di pedesaan.

Pusat Layanan Internet Kecamatan merupakan salah satu program Menteri Kominfo NO. 48/P/M.KOMINFO/11/2009 yang memperkenalkan internet kepada masyarakat, program ini dilakukan di seluruh Indonesia yang bertujuan mendorong masyarakat melek informasi melalui jaringan internet. Berdasarkan yang disebutkan di atas, maka perlunya penelitian ini dilakukan agar masyarakat bertambah wawasan dalam memperoleh dan mengolah informasi yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya. Selain itu, dengan adanya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang menjangkau masyarakat, maka masyarakat akan lebih bertambah wawasannya dan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

merupakan tujuan dari Menkominfo NO. 48/P/M. KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan dalam menciptakan desa berdering yang masyarakatnya melek informasi dan komunikasi. ([www.langsungpilih.com](http://www.langsungpilih.com))

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) tersebar sekitar 5.748 Kecamatan di pelosok tanah air, sedangkan Mobil PLIK (M-PLIK) merupakan internet bergerak berupa pengadaan sebanyak 1.907 mobil untuk melakukan pengenalan dan akses internet di pedesaan secara berpindah-pindah, serta menetapkan untuk 32 ribu desa menjadi desa berdering, desa pintar, desa punya internet. Penyelenggaraan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang digagaskan bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat di pedesaan khususnya Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa. ([Koranjakarta.com](http://Koranjakarta.com))

Dengan adanya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang masuk ke tengah masyarakat, dapat bermanfaat bagi pemerintahan kampung Asa dan Kampung Juhan Asa dalam mempermudah pelaksanaan administrasi didalam pelaksanaannya. Dengan PLIK, pemerintahan di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa dapat dengan mudah memperoleh informasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memperbaharui apa yang menjadi kekurangan dalam proses pelaksanaan administrasinya. Apabila pemerintahan di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa telah memanfaatkan PLIK secara maksimal, maka masyarakat juga akan memperoleh manfaat dalam bentuk pelayanan administrasi yang baik.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 48/P/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan di Barong Tongkok ?
2. Apa yang menjadi kendala Implementasi 48/P/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan di Barong Tongkok ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 48/P/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan.
2. Mengidentifikasi kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 48/P/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan.

### **Manfaat Penelitian**

1. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan

- berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan/program pemerintah.
  3. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi***

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer pada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan yang diharapkan akan muncul manakala keluaran kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

### ***Faktor-faktor Implementasi***

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:89-90), Kebijakan dalam implementasi diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut dipengaruhi oleh tiga hal pokok:

1. Isi kebijakan
2. Format kebijakan
3. Reputasi aktor

### ***Model-model Proses Implementasi***

#### ***1. Model Merilee S. Grindle***

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi Kebijakan (*content of policy*) mencakup:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan;
- e) Siapa pelaksana program;

f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (content of implementation) mencakup :

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) kepatuhan dan daya tanggap.

## 2. *Model Mazmanian dan Sabatier*

- a). Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya :
  1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
  2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
  3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
  4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
- b). Karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya :
  1. Kejelasan isi kebijakan
  2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
  3. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
  4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
  5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
  6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
  7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
- c). Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), indikatornya :
  1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
  2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
  3. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups)
  4. Dukungan dari pejabat atasan
  5. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor
- d). Tahap-tahap dalam proses implementasi
  1. Output kebijaksanaan bidang pelaksana
  2. Kesiediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijaksanaan
  3. Dampak nyata output kebijaksanaan
  4. Dampak output kebijaksanaan sebagai persepsi
  5. Perbaikan mendasar UU

## ***Informasi dan Komunikasi***

Wahyudi (2004:30), Apabila globalisasi diartikan sebagai perkembangan kebudayaan manusia, maka informasi dan komunikasi muncul karena perkembangan teknologi informasi, diartikan sebagai teknologi elektronika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi serta percepatan arus informasi

### ***Pengertian Informasi***

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. (Subrata 2004:20)

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data (memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan) untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Secara singkatnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan:

1. Lebih cepat
2. Lebih luas penyebarannya, dan
3. Lebih lama penyimpanannya

### ***Definisi Desa***

Anjayani (2007:1), Istilah desa yang biasa kita pakai berasal dari bahasa India “swadesi” yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau biasanya juga diartikan sebagai tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan norma hidup dan memiliki batasan yang jelas.

### ***Pengertian Internet***

Sopian, Setyaji (2012:2), Secara harafiah, internet (kependekan dari “Interconnected networking”) ialah rangkaian computer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat computer untuk lalulintas data itulah yang dinamakan network. Istilah LAN (Local Area Network), yang menghubungkan computer-komputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah atau warnet. Jadi, computer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas disebut internet.

### ***Definisi Konsepsional***

Dari teori-teori yang dikemukakan, kemudian penulis mencoba untuk menyimpulkannya, maka definisi konsepsional dari penelitian Implementasi Peraturan Menteri dan Informatika Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan (Studi di Desa Asa dan Desa Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) adalah serangkaian pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemerintah di Kecamatan Barong Tongkok dalam melaksanakan peraturan Menteri kominfo di Desa Asa dan Desa Juhan Asa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang informasi dan komunikasi supaya dapat digunakan masyarakat secara optimal.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan serta memaparkan secara sistematis dengan penjelasan secara faktual dan akurat tentang fakta, sifat serta hubungan yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian *survey* guna memperoleh data primer dan sekunder mengenai pengimplementasian Kebijakan peraturan menteri komunikasi dan informatika NO. 48/P/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

### ***Lokasi Penelitian***

Penulis menetapkan tempat penelitian di desa Asa dan desa Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan maka fokus dari penelitian ini dibatasi pada hal - hal yang berkaitan dengan implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 48/P/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan yaitu :

1. Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) meliputi :
  - 1.1.Komunikasi  
Sosialisasi kepada masyarakat tentang PLIK
  - 1.2.Sumberdaya
    - a. Kompetensi masyarakat dalam penggunaan PLIK
    - b. Sarana prasarana masyarakat dalam mendukung program PLIK
    - c. Sumberdaya finansial program PLIK
  - 1.3.Disposisi
    - a. Komitmen pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung Asa, Juhan Asa dalam menjalankan program PLIK
    - b. Transparansi pemerintah kecamatan dan kampung Asa, Juhan Asa dalam menjalankan program PLIK
  - 1.4.Struktur Birokrasi  
Prosedur standar pelaksanaan PLIK di Kampung Asa dan Juhan Asa
2. Kendala dalam implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

### ***Sumber Data***

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain meliputi:

- a. Dokumen-dokumen
- b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media masa yang relevan dengan fokus penelitian.

***Teknik pengumpulan data***

Dalam rangka memperoleh data untuk penelitian guna terselesaikannya skripsi ini, maka tehnik - tehnik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. *Library Research*, yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.
2. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi
  - b. Wawancara
  - c. Dokumen

***Teknik Analisis data***

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data diskriptif kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1992:18-20), analisis tersebut meliputi empat komponen yaitu :

1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data atau penyederhanaan data  
Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa.
3. Penyajian data atau *data display*  
Penyajian data adalah penyusunan informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.
4. Menarik kesimpulan atau *conclusion drawing*  
Menarik kesimpulan sebagai langkah ketiga dan disajikan dalam pengajuan data dengan cara mencatat keteraturan, pola - pola, penjelasan secara logis

dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi, hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 48/P/M. KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan (Studi di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat)***

Pengukuran yang pertama kali dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 48/P/M. KOMINFO/11/2009 Tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan (Studi di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat)". Penulis mengajukan pertanyaan kepada key informan dan informan terkait dengan pengetahuan narasumber mengenai Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK).

Seperti yang telah diungkapkan pada bab terdahulu bahwa Implementasi Kebijakan adalah merupakan salah satu tahapan dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan.

Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

### ***Komunikasi***

Bentuk dari komunikasi adalah melalui sosialisasi dalam mendukung Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan. PLIK merupakan program Menteri Komunikasi dan Informatika yang memberikan akses komunikasi dan informasi ke desa/kampung yang ada di setiap daerah di Indonesia yakni dalam bentuk internet masuk desa/kampung, oleh karena itu komunikasi dalam bentuk sosialisasi merupakan langkah awal yang tepat dalam memulai program tersebut. Komunikasi ini bertujuan menyampaikan kepada masyarakat tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan agar masyarakat mempunyai kesiapan apabila program dilaksanakan.

Sosialisasi Informasi yang jelas dan akurat merupakan modal bagi implementator untuk melaksanakan secara maksimal program PLIK. Dari hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa operator PLIK tidak berkomunikasi secara rutin dan berkoordinasi dengan masyarakat dalam mensosialisasikan program PLIK. Dengan sosialisasi informasi yang jelas, maka dapat dipastikan masyarakat dapat terbantu dalam menggunakan PLIK di lapangan.

Hasil temuan dalam penelitian ini, menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan PLIK di kampung Asa dan Juhan Asa, di antaranya tidak ada

sosialisasi yang di berikan pemerintah Kecamatan maupun Dinas Perhubungan tentang adanya program Pusat Layanan Internet Kecamatan dan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam implementasi PLIK di kampung Asa dan Juhan Asa.

### ***Sumber Daya***

Sumber daya dalam implementasi PLIK meliputi 3 (tiga) hal yaitu partisipasi masyarakat yang melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam implementasi PLIK, sarana prasarana merupakan alat penunjang untuk mendukung pelaksanaan PLIK, dan finansial adalah dana/biaya operasional dalam implementasi PLIK.

Dalam melaksanakan kebijakan harus mempunyai sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut akan berhasil. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup partisipasi masyarakat, fasilitas atau sarana prasarana, dan finansial, partisipasi masyarakat tentu sangat dibutuhkan agar program PLIK terlaksana karena masyarakat merupakan sasaran dari program PLIK, oleh karena itu diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan PLIK dan dengan finansial yang cukup maka segala persiapan yang dibutuhkan dalam implementasi PLIK dapat terpenuhi. Berikut penjelasan tentang partisipasi masyarakat, sarana prasarana, dan sumber daya finansial :

### ***Partisipasi Masyarakat***

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan harus bertanggung jawab dalam aktivitas pelaksanaan pembangunan dengan jalan mengerahkan dukungan tenaga, keterampilan, dana serta fasilitas bagi program pembangunan yang telah ditetapkan dan menciptakan suasana kerjasama dengan pelaksana pembangunan lainnya. Pengerahan yang optimal dari potensi masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan program perlu digali, dipelihara dan dikembangkan sehingga mampu menciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan PLIK, serta terwujudnya aktivitas yang kondusif dalam pelaksanaannya.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (2002: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Menurut Sumampouw (2004: 106-107), Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang agar masyarakat menjadi aktif dan berperan serta dalam program di masa mendatang.

Partisipasi masyarakat merupakan gagasan dan kemauan masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat kampung Asa dan Juhan Asa dalam ikut serta pada pelaksanaan PLIK dan memberikan gagasannya agar program PLIK dapat berguna bagi masyarakat kampung Asa dan Juhan Asa. Masyarakat di kampung Asa perlu diikutsertakan dalam implementasi program PLIK karena dengan demikian masyarakat dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk memberdayakan hidupnya dengan memanfaatkan PLIK dan internet ini dapat menjadi sarana yang sangat membantu pemerintah di kampung Asa dalam menjalankan birokrasi dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat di kampung Asa.

### ***Sarana Prasarana***

Menurut Syahril (2005:2) Sarana prasarana adalah barang atau benda yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pelaksanaan program PLIK unsur dari sarana tersebut dapat berbentuk seperti computer, cpu, meja, kursi, antena, mobil PLIK dan hal lain yang memfasilitasi pelaksanaan PLIK.

Dalam Menteri kominfo (2012), Sarana prasarana Pusat Layanan Internet kecamatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a). Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) permanen

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan penyediaan akses internet yang sehat, murah, dan aman, yang diberikan pada kampung/desa di ibukota kecamatan terdiri dari 6 computer yang menjadi wilayah program PLIK. PLIK dibangun untuk memberikan akses informasi dengan media internet kepada masyarakat dengan konten-konten yang edukatif dan mampu mendukung perekonomian di desa/kampung setempat.

b). Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)

Mobile PLIK (M-PLIK) merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (menggunakan mobil) untuk akses internet yang sehat, aman, edukatif, cepat, dan murah. Tujuannya adalah melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses informasi dan internet. Setiap kecamatan terdapat 6 unit Mobile PLIK. Mobile PLIK merupakan 1 unit mobil yang terdapat 5 unit computer dan 1 computer server yang dilengkapi dengan genset sebagai sumber tenaga.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kelengkapan sarana dan prasarana kelengkapan PLIK bisa dibilang tidak memenuhi ketuan dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, Seharusnya dalam ketentuan dari

Menteri Kominfo, setiap kampung/desa yang menerima program PLIK mendapat 6 (enam) unit komputer, sementara di kampung Asa hanya terdapat 3 unit komputer dan di kampung Juhan Asa hanya terdapat 2 unit komputer, hal ini tentu saja tidak memenuhi setandar ketentuan dari Menteri Kominfo.

### ***Sumber Daya Finansial***

Finansial juga dapat berarti administrasi yang mengelola urusan keluar masuknya uang pada sebuah institusi atau lembaga. Finansial sangat bergantung pada manajemen yang baik, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak yang bersangkutan. Intinya, finansial dapat diartikan sebagai segala aspek yang berkaitan dengan uang. Finansial juga berarti segala hal yang juga meliputiperputaran dan pengelolaan uang lebih singkatnya.

Selain sumber daya yang menyangkut sarana prasarana dan sumber daya masyarakat pengguna Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), sumber daya finansial tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pemerintah, tanpa adanya sumber dana maka program pemerintah tidak akan berjalan.

### ***FaktorPenghambat Imnplementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Dalam Pelaksanaannya Di Kampung Asa dan Kampung Juhan Asa***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dalam pelaksanaannya yaitu kualitas sumber daya manusia Kampung Asa dan Juhan Asa.

Kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki masyarakat kampung Asa dan Juhan Asa adalah merupakan faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah sehingga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK).

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi PLIKdalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang internet dalam meningkatkan taraf hidupnya di kampung Asa dan Juhan Asa berawal dari masalah mengenai masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kampung yang berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan khususnya bagi para pelaku atau pengguna internet dalam implementasi kebijakan PLIK. Rendahnya kualitas SDM juga akan mempengaruhi kualitas masyarakat dalam penggunaan PLIK. Tingkat pendidikanmasyarakat, kondisi ini kemudian berakibat pada kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat dalammenggunakan PLIK.Selain itu dampak dari rendahnya SDMmasyarakatjuga membuat masyarakat kampung Asa dan Juhan Asa belum mampu dan kreatif untuk menggunakan program internet dalam membantu kegiatan masyarakat sehari dan internet belum bisa membantu masyarakat dalam memudahkan pekerjaannya sehari-hari.

Selain rendahnya SDM aparat kampung/desa juga tidak adanya sosialisasi dari Kecamatan maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat kepada masyarakat yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Dinas Perhubungan dalam kegiatan pengenalan PLIK kepada masyarakat merupakan salah satu hambatan internal. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan pelaksanaan menjadi terhambat, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan diadakannya program PLIK, sehingga ketika PLIK diadakan warga masyarakat banyak yang tidak dapat menggunakan program PLIK secara optimal dalam kegiatan tersebut. Sedangkan masyarakat merupakan salah satu unsur terpenting dalam kegiatan pelaksanaan program PLIK ini. Akibatnya masyarakat merasa kurang merasakan dampak dari implementasi PLIK. Dengan adanya sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan program PLIK ini yang akan dilakukan dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta sepenuhnya dalam memanfaatkan PLIK untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung Asa dan Juhan Asa.

### **Kesimpulan**

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan PLIK yang diketahui masyarakat kampung Asa dan kampung Juhan Asa, maksudnya apa yang menjadi tujuan program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) tidak cukup terlaksana dan tidak ada informasi tentang PLIK yang akurat, sarana-sarana seperti komputer yang tidak berfungsi, dan program Pusat Layanan Internet Kecamatan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, karena kurangnya ketetapan atau komitmen intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kecamatan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan cara implementasinya di lapangan yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi PLIK yaitu dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga petugas lapangan yang sedikit.

### **Saran**

Sumber daya PLIK merupakan hal yang penting untuk diperhatikan secara berkalala, sumber daya finansial harus ada transparansi kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya finansial tersebut seperti bagaimana proses distribusi dana PLIK. Sarana perasarana PLIK ini pada kenyataannya di lapangan banyak sekali mengalami kerusakan seperti computer yang tidak berfungsi dan tidak adanya jaringan sehingga masyarakat tidak bias menggunakan PLIK dan partisipasi untuk ikut serta membantu pelaksanaan program PLIK, seharusnya pemerintah harus selalu memantau bagaimana

kelayakan sarana prasarana di lapangan, karena apabila sarana prasarana tidak mendukung, sudah pasti akan menghambat kinerja program itu sendiri.

Diharapkan pihak Kementerian lebih sering melakukan pengawasan terhadap program Pusat Layanan Internet Kecamatan di setiap daerah yang mendapat kebijakan implementasi PLIK, bahkan sesekali melakukan inspeksi mendadak serta melakukan evaluasi secara yang berkelanjutan perperiode terhadap kualitas pelaksanaan yang telah dilaksanakan bawahannya sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.48/P/M-KOMINFO/9/2009 tentang Pusat Layanan Internet Kecamatan. Selain itu, setiap daerah dan Kementerian Kominfo harus saling bekerjasama dalam menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan PLIK serta pelaksanaan PLIK juga harus dengan perencanaan yang baik dalam penempatannya dan dipertimbangkan menurut kondisi lingkungan setiap daerah yang menurut letak geografisnya.

### **Daftar Pustaka**

- Anjayani, Eni. 2007. *Desaku Masa Depan*. Cempaka Putih. Mancanan, Klaten
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cangara, Hafied, 2003. *Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Conyers, Diana. 2002. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, William N. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kelima*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan 2003 *Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi. Jakarta
- J. Moleong, Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi Revisi)* PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Murniatmoto, Gatut. 2001. *Dampak Globalisasi Informasi Terhadap Kehidupan Sosial*. CV Fica Sari. Yogyakarta
- Mustopadidjaja, AR. 2002. *Manajemen Development (Manual)-Public Policy*: LAN. Jakarta
- Ningrat, Handayana, Soewarno, 2002. *Pengatur Ilmu Studi dan Manajemen*. CV Haji Masagung. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan Ketiga. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

- Sumampouw, Monique. 2004. "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacub Rais, *et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sopian, Sudarma, dan Setyaji, Jarot. 2012. *Buku Super Pintar Internet*. Mediakita. Jakarta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan public*. Bandung: Alfabeta.
- Syahril. 2005, Manajemen Sarana dan Prasarana, Padang : UNP PRESS
- Usman, Husaini., dan Akbar, Purnomo Setiady, 2005, *Meyodologi Penelitian Sosial*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul, 2012. *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahyudi, JB. 2004. *Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak*. PT Gramedia Pustaka. Jogjakarta

#### **Dokumen:**

- Buku Materi Bimbingan Teknik Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Dalam Rangka Desa Informasi*, 2012, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta.
- Info Singkat, 2009. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi
- Prianova, Pratama, Indra, 2010. *Sterategi Implemantasi*. FT UI. Jakarta.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta
- Subrata, 2004. *Media Massa Dalam Era Globalisasi*. Kompas 27 Oktober. Jakarta.

#### **Website:**

- <http://m.koran-jakarta.com> ( Diakses tanggal 12 Novenber 2014)
- <http://radarbanjarmasin.co.id> ( Diakses tanggal 12 Novenber 2014)
- <http://id.Wikipedia.Org/wiki/komunikasi> ( Diakses tanggal 12 Novenber 2014)
- <http://www.kompasiana.com> ( Diakses tanggal 27 Juni 2015)
- <http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html> ( Diakses tanggal 26 Juni 2015 )
- <http://wikipwdia.com> ( Diakses tanggan 27 Juni 2015 )